

# PROSPEK MONETER DAN PERKREDITAN DI INDONESIA

*Djokosantoso Moeljono*

*In October 1988 the banking industry was deregulated which substantially increased the competition. The comprehensive deregulation include an improvement in prudential regulations and the supervisory framework, a further reduction in the scope of credit programs, further relaxation in the control on interest rates, a loosening of barriers in the banking industry. As a result since 1988 growth of the financial sector has been dramatic. The relaxation on branching requirements and competition led a dramatic increase in the numbers of bank office, especially of private domestic bank whose branches expanded rapidly.*

*The deregulation also introduced some problems in the bank industry. The problem of loans appeared to have risen in the period of rapid expansion after the deregulation that lead to financial distress. A number of banks with problems have already emerged and have been rescued by arranging for a merger or take-over by another bank. In this article emphasize the impact of the 1988 deregulation policy on the banking industry and anticipate the prospect of the banking industry.*

## **Pendahuluan**

Selama 25 tahun terakhir, Indonesia telah mencapai berbagai kemajuan dalam bidang ekonomi seperti terlihat dalam peningkatan produk domestik bruto dan pendapatan per kapita, pertumbuhan jumlah dan ragam produksi, investasi, tabungan nasional, kenaikan serta diversifikasi ragam dan tujuan ekspor non-migas. Indikator sosial lainnya juga menunjukkan kemajuan-kemajuan yang menggembirakan, sehingga peningkatan pendapatan per kapita Indonesia dari US\$50 pada tahun 1967 menjadi sekitar US\$650 pada saat ini dapat dikatakan dirasakan oleh hampir seluruh penduduk. Ketergantungan akan hasil ekspor migas sebagai sumber utama penerimaan pemerintah maupun devisa selama

empat Repelita, telah berhasil dikurangi, hingga pangsa ekspor migas menurun dari 83% dari total hasil ekspor pada tahun 1983 menjadi lebih kecil dari 50% pada tahun 1993. Hal ini sangat menguntungkan pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan manajemen makro ekonominya, karena tidak perlu tergantung dari turun naiknya harga minyak.

Data yang ada menunjukkan bahwa kebijaksanaan makro ekonomi yang diterapkan selama 25 tahun terakhir cukup berhasil mengendalikan inflasi dan cukup efektif mengamankan defisit pada transaksi berjalan, tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi. Hal ini bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan, namun pemerintah Orde Baru dengan konsisten menjalankan kebijakan untuk menjaga kestabilan bidang makro

ekonomi yakni kestabilan harga, kestabilan suku bunga, kestabilan kurs serta kemandirian iklim usaha.

Tulisan ini bermaksud untuk menelaah hasil kebijakan moneter di Indonesia pasca Pakto 88 khususnya masalah perkreditan, serta antisipasi terhadap sektor perbankan.

### **Kebijakan dan Deregulasi Ekonomi dan Keuangan**

Penurunan harga minyak yang sangat drastis pada tahun 1983 yang terulang lagi pada tahun 1986 mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi yang sangat struktural, dimana peranan swasta dirasakan perlu untuk ditingkatkan. Demikian pula sumber dana pembangunan perlu diusahakan tidak terlalu tergantung dari tabungan pemerintah, melainkan semaksimal mungkin dengan meningkatkan tabungan swasta. Selain itu, sumber penerimaan pemerintah diusahakan untuk tidak terlalu tergantung pada hasil penerimaan ekspor minyak. Ini berarti pemerintah harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan jumlah maupun jenis ekspor non-migas di luar ekspor barang-barang tradisional seperti hasil pertanian dan tambang. Keseluruhan tujuan ini akan dapat dicapai apabila kebijakan pemerintah di bidang ekonomi makro seperti kebijakan moneter dan fiskal, kebijakan investasi, kebijakan perdagangan, dan kebijakan nilai tukar, dikelola sedemikian rupa.

Peningkatan ekspor nonmigas termasuk pariwisata dan berbagai produk jasa lainnya dengan sendirinya memerlukan pelayanan perbankan yang semakin luas, serta pasar valuta asing yang lebih fleksibel. Untuk itu, pemerintah memperkenalkan paket kebijakan di bidang keuangan, moneter dan perbankan pada tanggal

27 Oktober 1988 (Pakto 27) yang pada intinya meningkatkan persaingan sesama bank dalam pengerahan dana dan pelayanan berbagai kebutuhan masyarakat, dan memperkaya instrumen moneter dan kebijaksanaan tentang penentuan kurs devisa. Di samping itu peningkatan efisiensi dan kesehatan perbankan juga diupayakan melalui perlakuan batas maksimum pemberian kredit kepada debitur dan debitur group maupun pemegang saham dan pegawai lembaga keuangan yang bersangkutan. Selain itu, berbagai piranti moneter disempurnakan, misalnya penurunan likuiditas wajib minimum menjadi 2% dari seluruh dana pihak ketiga, dan SBI dan SBPU ditambah dengan yang berjangka waktu 30 hari sampai dengan 180 hari. Penurunan likuiditas wajib minimum akan meningkatkan *multiplier* uang beredar sehingga meningkatkan kemampuan pengendalian uang beredar melalui pengaturan uang primer. Peningkatan monetisasi dengan jalan memberikan kemudahan dalam memperluas jangkauan pelayanan sampai ke pelosok negara diharapkan akan dapat meningkatkan aktivitas perekonomian. Terobosan dalam pengembangan pasar uang dan modal pada tahun 1987, juga diharapkan dapat memicu dunia bisnis untuk lebih tanggap dan profesional dalam menentukan kombinasi sumber pembiayaan, agar diperoleh rata-rata modal serendah mungkin dengan resiko yang penuh perhitungan.

Kebijakan moneter yang dijalankan tentunya harus dilengkapi dengan kebijakan sektor riil lainnya, seperti misalnya kebijakan industri yang lebih *export oriented*, kebijakan perdagangan yang lebih mengarah ke penggunaan *tariff barriers* yang sangat dikurangi jumlah pos maupun tingkat tarifnya, dan kebijakan fiskal

Tabel 1. Indikator Perekonomian Selama External Shock dan Kebijakan Reformasi (Tingkat Pertumbuhan Tahunan, Kecuali Item 14 dan 15)

	OIL - BOOM	EXTERNAL - SHOCKS	REFORMASI AKTIF
	1980 - 83	1983 - 86	1986 - 1990
1. Pertumbuhan Ekonomi (Rp, Harga 1983)			
a. Produk Domestik Bruto	3.2%	5.1%	6.4%
- Minyak	-4.3%	3.3%	2.5%
- Non-minyak	5.2%	5.6%	7.4%
b. Pendapatan Domestik Bruto	4.1%	3.7%	6.1%
2. Pertumbuhan Sektorial (Rp, Harga 1983)			
a. Pertanian	2.6%	3.7%	3.4%
b. Pertambangan	-4.4%	0.4%	1.8%
c. Manufaktur	3.6%	14.0%	11.0%
d. Konstruksi	6.1%	0.1%	10.0%
e. Listrik	18.9%	11.0%	14.0%
f. Jasa-jasa	8.2%	5.8%	7.4%
3. Pengeluaran Konsumsi (Rp, Harga 1983)	7.2%	2.7%	5.3%
a. Private	7.5%	2.4%	5.3%
b. Pemerintah	5.5%	4.6%	5.2%
4. Pembentukan Modal Bruto (Rp, Harga 1983)	6.6%	3.2%	11.6%
a. Private	16.1%	4.1%	15.2%
b. Pemerintah	-2.9%	1.9%	5.0%
5. Eksport Barang dan Jasa-Jasa (Rp, Harga 1983)	-8.8%	4.2%	7.8%
Import Barang dan Jasa-Jasa (Rp, Harga 1983)	9.7%	0.5%	4.3%
6. Eksport Barang (US\$, Harga Berlaku)	-1.2%	-11.2%	14.8%
- Minyak	0.9%	-19.9%	7.8%
- Non-minyak	-6.8%	9.2%	22.1%
7. Import Barang (US\$, Harga Berlaku)	14.7%	-13.1%	17.4%
- Minyak	33.3%	-35.6%	15.0%
- Non-minyak	10.3%	-7.6%	17.7%
8. Uang Beredar (Rp, Harga Berlaku)			
M2 (Broad money)	33.9%	23.5%	32.3%
M1 (narrow money)	33.9%	15.4%	19.6%
9. Klaim Terhadap Otoritas Moneter (Rp, Berlaku)	26.9%	20.7%	13.8%
10. Anggaran Pemerintah (Rp, Harga Berlaku)	13.8%	9.9%	18.9%
a. Pendapatan Non-minyak	16.5%	25.8%	21.5%
b. Pendapatan Minyak	10.0%	-2.5%	13.1%
c. Pinjaman	26.4%	14.6%	23.9%
d. Pengeluaran Pembangunan	10.7%	7.0%	15.2%
11. Harga Minyak (US\$ per barrel, harga nominal)	0.0%	-22.7%	13.0%
12. Nilai Tukar (Rp per US\$)	13.2%	12.1%	9.5%
13. Tingkat Inflasi	11.2%	4.9%	8.3%
14. Kondisi Kemiskinan *) (% Masyarakat Dibawah Garis Kemiskinan)			
a. Kota	12.1%	7.3%	7.3%
b. Desa	39.4%	26.8%	20.8%
c. Total	33.0%	21.7%	16.7%
15. Gini Index 8)	0.331	0.321	0.319

Catatan: \*) Estimasi World Bank: kolom pertama untuk 1984, kedua untuk 1987, dan ketiga untuk 1990.

Tabel 2. Indonesia: Ramalan Ekonomi Tahun 1994  
(Tingkat Pertumbuhan Tahunan, Sumber Pertumbuhan, Dan Catatan Lainnya)

	AKTUAL	ESTIMASI	RAMALAN	
	1985 - '90	1992	1993	1994
1. Pertumbuhan Ekonomi (Rp, Harga 1983)				
a. Produk Domestik Brutto	6.3%	5.9%	6.3%	6.4%
b. Pendapatan Domestik Brutto	4.9%	4.9%	5.5%	5.4%
2. Pertumbuhan Sektoral (Rp, Harga 1983)				
a. Pertanian	3.2%	3.7%	3.6%	3.3%
b. Pertambangan	2.5%	0.1%	0.1%	1.0%
c. Manufaktur	10.7%	11.0%	11.4%	11.7%
d. Konstruksi	7.3%	6.4%	6.7%	6.4%
e. Listrik	15.0%	16.3%	16.4%	13.2%
f. Jasa-jasa	7.3%	6.3%	6.5%	6.5%
3. Pengeluaran Konsumsi (Rp, Harga 1983)	4.7%	4.8%	5.4%	6.6%
4. Pembentukan Modal Brutto (Rp, Harga 1983)	11.1%	5.5%	7.1%	7.1%
5. Ekspor Barang dan Jasa-Jasa (Rp, Harga 1983)	4.3%	9.4%	11.5%	14.0%
Impor Barang dan Jasa-Jasa (Rp, Harga 1983)	4.3%	6.2%	6.4%	7.5%
6. Ekspor Barang (US\$, Harga Berlaku)	6.7%	8.8%	14.9%	15.2%
- Minyak	- 2.5%	- 11.9%	1.6%	3.9%
- Non-minyak	19.9%	21.8%	20.9%	19.5%
7. Impor Barang (US\$, Harga Berlaku)	14.7%	10.1%	11.4%	12.9%
- Minyak	8.5%	- 7.4%	12.6%	5.6%
- Non-Minyak	15.5%	12.0%	11.3%	13.5%
8. M2 (broad money, Rp, Harga Berlaku)	29.6%	9.9%	18.5%	19.4%
9. M1 (narrow money, Rp, Harga Berlaku)	18.7%	9.4%	17.0%	18.2%
10. Anggaran Pemerintah (Rp, Harga Berlaku)	15.6%	8.1%	9.5%	8.9%
11. Harga Minyak (US\$ per - barrel, harga nominal)	- 4.9%	- 7.2%	- 2.2%	5.6%
12. Nilai Tukar (Rp per US\$)	10.7%	5.2%	5.0%	5.0%
13. Tingkat Inflasi	7.8%	4.9%	7.5%	5.8%
14. Sumber Pertumbuhan (Rp, Harga 1983)				
a. Konsumsi Masyarakat	2.6%	3.0%	3.1%	3.4%
b. Investasi Masyarakat	2.4%	0.6%	1.3%	1.6%
c. Pembelian Pemerintah	0.9%	1.0%	1.0%	1.1%
d. Ekspor	2.2%	2.9%	3.6%	4.6%
e. Impor	- 0.9%	- 1.3%	- 1.4%	- 1.6%
f. Bukan Ekspor	1.3%	1.5%	2.2%	3.0%
g. Perubahan Stock	- 0.9%	- 0.2%	- 1.3%	- 2.7%
15. Defisit Neraca Berjalan				
- US\$ billion		0.3%	3.5%	3.6%
- Persentase dari PDB		3.1%	2.6%	2.5%

yang sepadan dengan kebijakan moneter.

Proses deregulasi di bidang perekonomian Indonesia yang merupakan ciri kebijakan ekonomi di era globalisasi menunjukkan berbagai tanda yang menggembirakan. Tabel 1 dan 2<sup>1</sup> menunjukkan berbagai indikator ekonomi makro, yang dibagi atas masa *oil boom*, masa terjadinya *external shocks*, dan masa deregulasi aktif. *Anti export bias* yang sangat mempengaruhi daya saing ekspor Indonesia telah diganti tempatnya dengan berbagai fasilitas tarif, sehingga peranan sektor non-minyak terhadap total ekspor menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya. Pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 22% antara periode 1988-1990 itu terutama disebabkan oleh pertumbuhan sektor manufaktur yang sangat fantastis. Selain itu, berbagai unsur yang menyebabkan terjadinya ekonomi biaya tinggi telah pula diusahakan untuk dihilangkan, walaupun masih belum berhasil penuh. Meskipun masih ada kesan yang sangat kuat bahwa kebijakan yang ada belum menyentuh produsen yang menjual barangnya ke pasar dalam negeri dan konsumen dalam negeri, namun secara keseluruhan terlihat adanya kesungguhan pemerintah untuk mengurangi proteksi, demi peningkatan efisiensi dan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

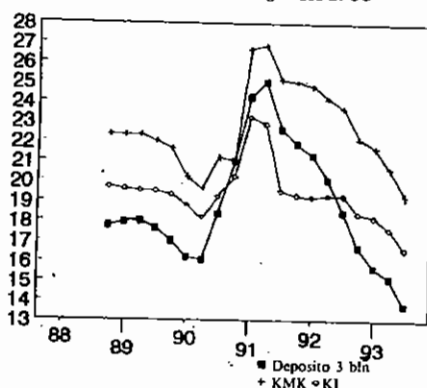
## Dampak Kebijakan Moneter 1988

### Persaingan Pasar

Kemudahan perluasan jaringan dan pendirian bank baru telah diantisipasi dengan pembukaan cabang

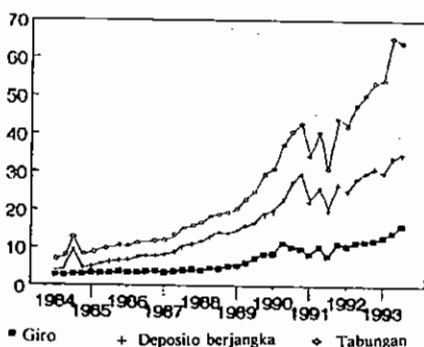
bank baru maupun pendirian bank baru. Jumlah bank dan kantor cabangnya menjadi berlipat ganda dan dengan kelangkaan sumber daya manusia menyebabkan banyak cabang bank baru dipimpin oleh tenaga-tenaga yang kurang berpengalaman di bidang perbankan. Puluhan bank dan ratusan kantor cabang baru disertai persaingan yang besar telah mendorong peningkatan suku bunga (Grafik 1).

Grafik 1. Perkembangan Tingkat Bunga Pada BPUG



Pada gilirannya, peningkatan suku bunga mendorong kegairahan masyarakat untuk menabung (Grafik 2).

Grafik 2. Simpanan pada Bank di Jakarta (trilyun Rp)



<sup>1</sup>Tabel 1 dan 2 dikutip dari perkiraan yang dibuat oleh Iwan Jaya Azis dari FEUI untuk *Pacific Economic Outlook*, Osaka, Japan, 1993.

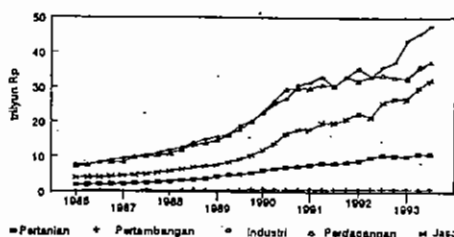
Sebagai akibatnya, posisi dana yang dihimpun meningkat dari Rp 37,5 triliun pada tahun 1988 menjadi Rp. 54,5 triliun pada akhir 1989. Penurunan *reserve requirement* dari 15% menjadi 2% mengakibatkan peningkatan penyaluran dana yang sangat nyata sehingga posisi kredit perbankan meningkat pesat dari Rp 44 triliun (1988) menjadi Rp 63,6 triliun (1989) (Tabel 3). Gejala peningkatan ini terus terjadi pada tahun 1990 dengan laju pertumbuhan yang lebih besar lagi. Dilihat dari komposisinya (Grafik 3), sebagian besar kredit dicurahkan pada sektor perdagangan, dan kemudian diikuti dengan sektor jasa. Kedua sektor ini pula yang mengalami laju pertumbuhan tertinggi pada kurun waktu pasca pakto 88. Peranan Bank Swasta Nasional juga semakin meningkat, dan peningkatannya terasa lebih cepat setelah tahun 1988 (Grafik 4). Hal ini juga terlihat dalam tingkat efisiensi Bank Pemerintah (Tabel 4) dan Bank Swasta (Tabel 5) serta komposisi Asset Perbankan 1991 dan 1992 (Gambar 1 dan 2).

### "Overheated Economy" dan Ekspansi Kredit

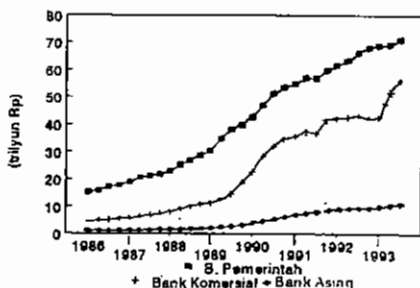
Besarnya pemberian kredit terutama untuk kredit yang bersifat konsumtif menambah jumlah uang beredar (M1) dengan cepat (Grafik 5), yang menyebabkan terjadinya *overheated* dalam perekonomian dan mendorong naiknya tingkat inflasi dibanding tahun-tahun sebelumnya (Grafik 6). Data yang ada menunjukkan bahwa sebagian kredit yang diberikan masih kurang terarah ke sektor-sektor produktif yang mempunyai nilai tambah yang besar. Kelebihan dana perbankan sebagai akibat mobilisasi dana besar-besaran

dengan tawaran suku bunga yang menarik, disalurkan dalam bentuk kredit konsumtif seperti misalnya kredit mobil dan rumah. Unsur spekulasi juga sangat berperan, yang terlihat dari indikasi naiknya harga tanah secara menyolok, terutama di daerah yang dianggap potensial untuk daerah perumahan dan perkantoran. Salah satu penyebabnya adalah kekurangan hati-hatian dan kurang profesionalnya sebagian bankir pada awal deregulasi perbankan, dan ditambah dengan kurangnya pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan keadaan makro di masa datang, di mana daya dukung infrastruktur kurang memadai untuk mengakomodasikan pertumbuhan permintaan yang begitu cepat.

Grafik 3. Komposisi Kredit (milyar Rp)



Grafik 4. Posisi Kredit Perbankan



Tabel 3. Posisi Kredit Perbankan dalam Rupiah dan Valas  
(billions of Rp)

	1986				1987				1988				1989			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
B. Pemerintah	15,240	15,872	17,225	17,782	18,902	20,497	21,229	21,676	22,894	24,993	27,072	28,631	30,270	34,710	38,020	39,579
B. Komersial	4,487	4,715	5,108	5,506	5,772	6,414	6,891	7,462	8,210	9,119	10,070	10,714	11,441	12,487	14,483	18,591
Bank Asing	1,072	1,060	1,095	1,204	1,219	1,367	1,366	1,406	1,520	1,525	1,650	1,913	1,994	2,460	2,750	3,115
Komposisi Kredit	22,430	23,416	25,272	26,402	27,852	30,385	31,734	32,852	35,081	38,202	41,513	44,001	46,526	51,662	57,382	63,606
Perbankan	1,825	2,003	2,016	2,097	2,197	2,394	2,468	2,656	2,891	3,181	3,397	3,610	4,311	4,716	4,959	5,283
Perdagangan	258	338	393	394	394	366	435	385	294	361	424	444	388	403	457	591
Industri	7,637	7,745	8,304	9,005	9,508	9,991	10,590	10,917	11,928	12,575	13,931	14,956	15,683	16,605	18,867	20,333
Jasa	7,160	7,447	8,415	8,399	8,504	9,685	10,054	10,247	10,997	11,957	13,387	13,888	14,687	16,253	17,927	20,109
Lainnya	3,913	4,061	4,121	4,345	4,403	4,854	5,164	5,460	5,978	6,302	6,817	7,382	7,590	8,392	9,285	10,424
	1,637	1,822	2,023	2,162	2,846	3,095	3,023	3,187	2,993	3,826	3,557	3,721	3,867	5,273	5,887	6,866

	1990				1991				1992				1993			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
B. Pemerintah	42,589	46,915	51,028	53,524	54,699	57,036	56,739	59,861	61,751	63,357	66,145	68,236	69,066	69,217	71,143	
B. Komersial	22,684	28,272	31,890	34,975	35,641	37,703	36,715	41,836	42,300	42,696	43,466	42,337	42,465	51,860	56,330	
Bank Asing	3,786	4,463	5,265	6,177	6,837	7,432	8,006	8,512	9,060	9,228	9,364	9,330	9,695	10,413	11,043	
Komposisi Kredit	71,564	82,334	91,036	97,696	100,413	105,260	104,718	113,608	116,559	118,834	122,712	123,689	124,922	135,412	142,687	
Perbankan	5,982	6,525	6,974	7,176	7,629	8,197	8,169	8,465	8,899	9,793	10,471	10,281	10,127	10,793	10,759	
Perdagangan	519	594	603	615	645	664	707	743	730	741	803	762	724	615	707	
Industri	22,449	25,257	26,712	30,502	31,313	32,992	30,226	33,131	35,411	33,157	35,934	37,289	43,473	45,413	47,548	
Perdagangan	22,814	26,260	29,355	29,737	29,590	30,774	30,336	33,049	31,907	33,158	33,567	32,944	32,534	35,650	37,234	
Jasa	11,862	13,871	16,553	17,897	17,809	19,772	19,702	20,814	22,532	21,382	25,666	26,616	26,604	29,846	31,917	
Lainnya	7,938	9,827	10,839	11,769	13,427	12,861	15,578	17,406	17,080	20,603	16,271	15,797	11,460	13,095	14,522	

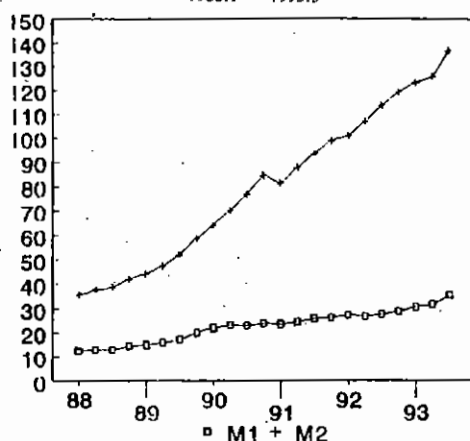
Tabel 4. Tingkat Efisiensi Bank Pemerintah 1993  
(milyar Rp)

Bank	Aset	Modal	Laba	ROE	ROA
BNI 46	26,827	822.13	178,195	21.67	0.66
BBD	24,840	744.35	91,137	21.24	0.37
BDN	23,761	777.29	120,126	15.45	0.51
BRI	23,607	1,069.50	75,300	17.04	0.32
B. EXIM	15,348	678.00	130.670	19.27	0.85
BAPINDO	14,850	615.50	38.700	6.29	0.26
BTN	5,510	611.00	37,920	6.21	0.68

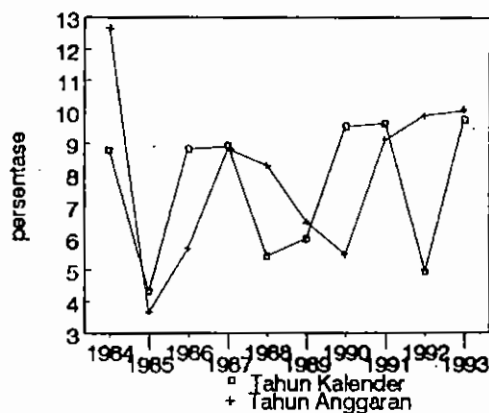
Berdasarkan Neraca September 1993.

Grafik 5. Perkembangan M1 dan M2

1988.1 - 1993.3



Grafik 6. Tingkat Inflasi Indonesia



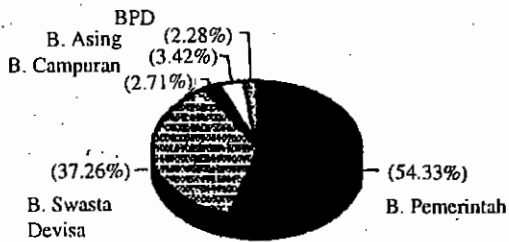


Tabel 5. Tingkat Efisiensi 10 Bank Swasta 1993  
(milyar Rp)

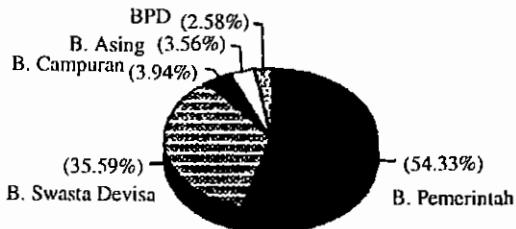
Bank	Aset	Modal	Laba	ROE	ROA
BCA	15645	750	72.691	9.69	0.64
DANAMON	7326	444.28	37.589	8.46	0.51
BII	5319	369.568	120.597	32.63	2.27
BDNI	5326	315.408	55.67	17.59	1.06
LIPPO	4319	197.03	476.26	23.99	1.08
BUN	4080	194.459	20.806	10.7	0.51
B. NIAGA	3582	164.418	35.041	21.3	0.98
B. BALI	3476	206.18	66.031	32.03	1.9
B. PANIN	2915	277.935	37.04	13.33	1.27
B. DUTA	2648	230.546	24.385	10.58	0.92

Berdasarkan Neraca September 1993.

Gambar 1. Komposisi Aset Perbankan 1991



Gambar 2. Komposisi Aset Perbankan 1992



Secara teoritis kita ketahui, bahwa perkembangan yang cepat di sektor moneter, apabila tidak diikuti dengan pertumbuhan yang setara di sektor riil akan menimbulkan kenaikan harga, karena lebih besarnya permintaan potensial dibandingkan dengan jumlah *supply* barang secara total. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya *overheated economy* yang dikhawatirkan akan mempunyai efek negatif terhadap hasil pembangunan diukur dari laju pertumbuhan riil.

### **"Tight Money Policy" dan Kredit Macet**

Untuk mengurangi mesin ekonomi yang panas tersebut, Pemerintah mengambil langkah pengetatan kredit yang dikenal dengan Gebrakan Sumarlin II pada akhir Februari 1991, dan pembentukan Tim PKLN untuk memantau dan membatasi pinjaman luar negeri guna pengendalian neraca pembayaran sejak September 1991. Kebijakan uang ketat ini mengakibatkan banyak bank mengalami kekurangan likuiditas, yang pada gilirannya dirasakan akibatnya oleh sektor dunia usaha yang kekurangan sumber dana untuk menjalankan usahanya. Ditambah dengan kemungkinan kurang baiknya penilaian proyek yang dibiayai, maka banyak bank mengalami kesulitan karena sebagian besar nasabahnya mengalami kredit macet. Pada gilirannya, tingkat risiko yang tinggi ditambah dengan kekurangan likuiditas yang dialami perbankan telah mendorong suku bunga pinjaman naik. Bersamaan dengan itu, demi untuk mengurangi uang yang beredar yang dikhawatirkan akan memicu inflasi, Bank Indonesia meningkatkan suku bunga SBI. Dari sudut dunia usaha, kebijakan uang ketat yang berkelanjutan ini sangat

mengganggu rencana investasi yang sangat berkurang sebagai akibat naiknya suku bunga. Bahkan, para pengusaha dan juga perbankan merasa seakan-akan terjebak dalam "lingkaran setan" antara tingginya beban bunga, investasi yang mengendor, sulitnya kredit, penurunan produksi, ketidakmampuan menambah kapasitas produksi, dan kredit macet.

### **"Capital Adequacy" dan "Legal Lending Limit"**

Sangat disadari bahwa berbagai perubahan dalam perekonomian dan lingkungan internasional membutuhkan lembaga keuangan yang sehat dan kokoh kapitalisasinya. Ketentuan mengenai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang ditetapkan oleh Bank for International Settlement (BIS) yakni pusatnya para bank sentral dari berbagai negara yang berpusat di pasar internasional. Untuk mencapai sasaran 7% dan 8% CAR masing-masing pada akhir Maret dan Desember 1993, bank mempunyai dua pilihan. *Pertama*, dengan menambah dana segar sehingga peningkatan aktiva seperti misalnya kredit dapat dilakukan sesuai dengan penambahan modalnya. Atau *kedua*, dengan mengurangi unsur pembagiannya, yakni dengan menekan ekspansi kredit. Peraturan lainnya adalah pengaturan *Legal Lending Limit*. Besar dugaan bahwa selain karena pengaturan Batas Kredit Maksimum tadi, penekanan ekspansi kredit merupakan akibat dari kurangnya modal bank memenuhi CAR, sehingga satu-satunya cara memenuhinya adalah dengan menekan ekspansi kredit, seperti yang dirasakan sejak tahun 1991.

Tampaknya, walaupun sudah banyak berkurang dibanding tahun-tahun awal Pelita IV dan V, peranan

penerimaan minyak dan gas bumi masih tetap cukup menentukan struktur anggaran negara. Dengan demikian, gerakan harga minyak yang cenderung menurun pada akhir 1993 lalu menjadi sangat penting, terutama karena perilakunya sangat berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Pada puncak musim dingin di belahan bumi utara, justru harga minyak merosot tajam menjadi lebih rendah dari \$14 per barrel dibanding dengan harga pertengahan tahun sekitar \$17,50 per barrel. Terlepas dari apakah patokan harga minyak \$16,0 per barrel dalam RAPBN 1994/95 cukup konservatif atau terlampau optimis, yang jelas konsekuensinya adalah bahwa penerimaan dari sumber-sumber lain seperti misalnya perpajakan harus ditingkatkan, sedangkan pinjaman luar negeri tampaknya tidak akan diandalkan sebagai sumber utama karena agak bertentangan dengan usaha untuk menjadi mandiri. Dengan RAPBN ketat, jelas bahwa pemerintah selama Repelita VI akan mengandalkan pertumbuhan ekonominya pada sektor swasta, yang terlihat dari perkiraan porsi swasta dalam investasi pada tahun anggaran mendatang maupun selama Repelita VI sebesar 73%. Adalah wajar bahwa harapan para penguasa ekonomi yaitu sebagian besar dari investasi swasta tersebut akan berorientasi ekspor, sebab usaha yang demikian akan membantu memperbaiki neraca pembayaran dan biasanya lebih efisien karena harus bersaing di pasar internasional. Pada gilirannya, hal ini akan membantu menurunkan ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*), yang saat ini dirasakan masih cukup tinggi, yakni sekitar 4,5.

Bagi perbankan, kesemuanya ini berarti bahwa peran sektor perbankan sebagai fasilitator kegiatan perekono-

mian yang terus berkembang akan semakin bertambah besar. Seperti kita ketahui, dalam RAPBN 1994/95 pemerintah menargetkan peningkatan kredit perbankan sekitar 18,0% dibanding tahun anggaran sebelumnya, yang didasarkan atas perkiraan kebutuhan peningkatan investasi dan kegiatan sektor ekonomi yang akan mendorong peningkatan produk domestik bruto sebesar 6,7%. Dari segi dana perbankan, pemerintah memperkirakan bahwa mobilisasi dana giro, deposito dan tabungan perlu ditingkatkan sebesar 19,6% untuk bisa konsisten dengan perencanaan makro secara keseluruhan. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, bagaimana kemampuan industri perbankan untuk mengantisipasi perkembangan ini? Meskipun sebagian besar anggota industri perbankan telah mampu memperbaiki kondisi internal untuk memenuhi CAR, tampaknya dalam memasuki tahun 1994 pihak perbankan tidak boleh cepat berpuas diri. Masih banyak perbaikan yang harus dilaksanakan agar sektor keuangan dan perbankan benar-benar mampu menunjang kegiatan sektor riil, sektor perdagangan luar negeri maupun sektor pemerintah.

Uraian di atas menggambarkan bahwa tampaknya ekspansi kredit akan marak kembali, dan saya tidak meragukan bahwa industri perbankan "*have learn a lesson*" dari pengalaman kredit di masa lalu. Masalahnya sekarang adalah, bagaimana kiat sektor perbankan dalam menghadapi tahun 1994 dengan perkembangan kebijaksanaan ekonomi makro seperti uraian di atas?

### **Perbaikan Struktur Modal dan Alokasi Kredit**

Saya rasa cukup logis apabila kita menganggap bahwa setiap bank akan tetap menjaga posisi CAR-nya, dan menyesuaikan Kualitas Aktiva Produktif (KAP)-nya agar Cadangan Aktiva Produktif (CAP)-nya dapat ditekan serendah mungkin. Demikian pula halnya dengan masalah *Legal Lending Limit*, yang dapat diupayakan untuk diturunkan dengan melakukan negosiasi ulang kredit lama atau dengan meningkatkan permodalan, baik dengan cara menambah modal disetor atau dengan melakukan *right issue*, bagi bank yang telah masuk ke pasar modal. Masalah perbaikan struktur modal ini semakin penting artinya dalam era globalisasi dan persaingan yang semakin tajam, karena tingkat efisiensi perbankan banyak tergantung pula dari kesehatan struktur permodalan suatu bank.

Masalah kredit macet yang dihadapi sebagian bank di masa lalu memberikan peringatan kembali akan pentingnya pertimbangan penyebaran risiko dalam berbagai bentuk. Salah satu caranya adalah dengan membentuk sindikasi ataupun konsorsium, terutama bagi kredit besar. Cara lain adalah dengan melakukan ekspansi kredit yang tidak terkonsentrasi hanya pada kelompok atau jenis usaha tertentu, melainkan diusahakan untuk menyebar ke kelompok lainnya, yakni kelompok menengah dan kecil, dengan diversifikasi usaha yang lebih beragam. Hal ini juga akan membantu bank dalam memenuhi target Kredit Usaha Kecil (KUK) sebesar 20% dari kredit yang disalurkan. Jelaslah bahwa hal ini memerlukan usaha yang sungguh-sungguh, karena memang belum banyak bank yang berpengalaman dalam menangani dan membia-

yai sektor usaha menengah dan kecil. Namun saya berpendapat bahwa kemampuan untuk mendiversifikasi risiko dengan cara mendiversifikasi jenis nasabah adalah hal yang tidak terhindarkan dan dapat dilakukan. Pengalaman di berbagai negara seperti Amerika dan Jepang menunjukkan bahwa sektor *'retail'* dan usaha industri kecil pada umumnya merupakan nasabah yang kurang bermasalah, walaupun administrasinya lebih rumit dan memerlukan banyak energi.

### **Pengaruh Maraknya Pasar Modal**

Tambahan dana dari pasar modal akan membantu sektor swasta dalam pendanaan dan akan mendorong pertumbuhan sektor industri manufaktur, industri properti, maupun industri *public utility*. Berbagai faktor pendukung cerahnya pasar modal antara lain turunnya suku bunga deposito, komitmen pemerintah, dan perbaikan aturan main pasar modal yang meningkatkan kepercayaan investor atas pasar modal.

Perkembangan pasar modal yang sedemikian rupa perlu diantisipasi dengan baik oleh industri perbankan, baik dalam perhitungan sebagai saingan sumber dana lainnya bagi perusahaan, maupun dalam memperhitungkan kemungkinan terjadinya *'difusi'* dana perkreditan yang tidak dipakai untuk meningkatkan kapasitas produksi, melainkan untuk berspekulasi di pasar modal. Jajaran pengelola perbankan ditantang untuk mempelajari diri mereka dalam membaca peran pasar modal terhadap pengalokasian maupun kualitas dari kredit mereka.

## EFISIENSI – pengaruh Globalisasi dan kompetisi

Keberhasilan pembangunan ekonomi dan sosial dengan sendirinya telah meningkatkan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Berbagai tantangan dan persaingan muncul. Globalisasi produksi, teknologi dan finansial, yang menjadikan batas-batas fisik suatu negara semakin kurang penting, membuat kancah persaingan produksi dan perdagangan semakin ketat. Era globalisasi ekonomi, teknologi dan informasi tersebut menimbulkan perubahan-perubahan yang cepat, terus-menerus, dan simultan. Ini menimbulkan dinamika-dinamika baru. Munculnya negara-negara pesaing baru seperti China dan Vietnam yang akan menyedot investasi internasional diduga merupakan salah satu penyebab menurunnya investasi asing selama tahun 1993. Semakin jelas pula bahwa untuk dapat bersaing, dibutuhkan unit-unit ekonomi yang mampu bergerak dengan fleksibel dan cepat tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Peranan sektor keuangan dan perbankan menjadi sangat penting artinya dalam mengantisipasi perubahan di atas. Sektor perbankan sendiri harus cukup efisien agar dapat menawarkan produk perbankan yang fleksibel dengan biaya yang cukup murah, terutama apabila tiba saatnya diterapkan hasil Uruguay Round yang juga menyangkut masalah globalisasi perbankan dan keuangan.

Efisiensi di dunia usaha termasuk usaha perbankan akan semakin penting artinya dengan dicapainya persetujuan Putaran Uruguay. Apabila banyak orang sering menyangsikan kesungguhan pemerintah dan dunia

usaha untuk meningkatkan efisiensi selama ini, dengan selesainya Putaran Uruguay, dunia usaha maupun pemerintah mengalami tekanan eksternal yang ekstra kuat untuk mau tidak mau bertopang kepada efisiensi yang tinggi, apabila masih ingin ikut berbicara di pasar internasional. Memang tidak dapat disangkal, bahwa cerah dan besarnya potensi pasar domestik yang menjanjikan untung besar akibat berbagai proteksi dan kesempatan monopoli akan membui pengusaha sehingga sering disebut sebagai 'jago kandang'. Namun tidak dapat dihindarkan lagi keharusan menghilangkan sumber inefisiensi seperti proteksi sektor hulu, dengan adanya globalisasi ekonomi dan keuangan.

Kemampuan untuk mengidentifikasi jenis usaha yang potensial, serta pengusaha yang efisien, merupakan tantangan bagi sektor perbankan dalam era persaingan dan globalisasi semacam ini. Sebagai contoh, usaha menengah dan kecil ternyata merupakan ujung tombak dari peningkatan ekspor nonmigas. Hal ini tidak mengherankan, karena usaha menengah dan kecil ini mempunyai struktur pasar yang bersaing dan tidak di proteksi, sehingga selama mereka mempunyai akses terhadap sumber dana perbankan, maka efisiensi adalah kata kunci untuk tetap 'exist' di dunia usaha. Hasil dari suatu studi empiris yang dilakukan oleh Miranda Goeltom-Siregar (1992)<sup>2</sup> untuk 253 perusahaan manufaktur di Indonesia,

<sup>2</sup>Goeltom-Siregar, M. Harris, J.R., and F. Schiantarelli, "How Financial Liberalization in Indonesia Affected Firms Capital Structures and Investment Decisions", The World Bank, Policy Research Working Paper #WPS 997, October 1992.

dan oleh penulis yang sama (1992)<sup>3</sup> untuk 292 perusahaan manufaktur di Indonesia selama kurun waktu 1980 - 1988, menunjukkan bahwa tingkat produktivitas (diukur dari *profitability ratio* dan *investment to capital ratio*) meningkat secara nyata setelah deregulasi perbankan pada tahun 1983. Dengan menggunakan peralatan ekonometri, kedua penelitian tadi menemukan bahwa tersedianya sumber dana dari luar serta karakteristik perusahaan merupakan faktor terpenting yang membedakan tingkat produktivitas berbagai perusahaan tersebut. Perusahaan yang mengekspor umumnya menunjukkan kinerja yang lebih baik secara absolut. Yang lebih penting lagi, pertumbuhan usaha manufaktur kecil mengalami perkembangan yang relatif lebih cepat, terutama bagi mereka yang mengekspor hasil usahanya. Jelaslah bahwa diversifikasi risiko dengan mengarahkan pinjaman ke lebih banyak perusahaan kecil yang efisien, daripada sedikit perusahaan besar yang belum tentu efisien merupakan pilihan yang perlu dipertimbangkan.

Sebagai contoh, dengan ditempuhnya berbagai deregulasi di bidang perbankan sejak tahun 1983, Bank Rakyat Indonesia sebagai salah satu Bank Pemerintah dengan jumlah aset terbesar, tetap mengutamakan pelayanan di sektor usaha kecil dan menengah dengan menggunakan suku bunga pasar. Di samping tetap melanjutkan pemberian kredit-kredit program, ini tidak berarti bahwa BRI mengabaikan pangsa pasar lainnya.

BRI juga telah mulai bergerak di sektor usaha skala besar dan korporasi sejalan dengan keleluasaan yang diberikan dalam Pakto 88. Semua ini tampak jelas dari kebijaksanaan perkreditan BRI yang mencakup strata I, II, III, dan IV dari kelompok yang termasuk golongan miskin sampai konglomerat. Dalam kenyataannya, kredit kecil memberikan penghasilan bunga yang lebih tinggi dari pada kredit skala besar, serta tingkat kredit macet yang kecil. Tampaknya unsur psikologis sebagai orang kecil yang merasa beruntung memperoleh akses ke dana perbankan, serta tiadanya alternatif sumber dana lain, seperti misalnya pasar modal atau *offshore loan* apabila kredibilitasnya rusak, merupakan salah satu faktor yang mendukung kesungguhan mereka mengembalikan kredit.

### **Sumber Daya Manusia - Fenomena Kelangkaan Tenaga Profesional ?**

Perubahan kebijakan pengembangan perbankan yang dilaksanakan dengan mengacu pada konsep mekanisme pasar, dalam bentuk pasar dengan persaingan yang tinggi akibat globalisasi, mau tidak mau harus diikuti dengan perubahan pola pengelolaan bank. Penerapan konsep profesionalisme pada bank swasta nasional merupakan fenomena mutakhir yang tidak terhindarkan, di mana jelas perlu dilakukan pemisahan antara pemilik dengan pengelola perbankan. Namun demikian, pengadaan tenaga pelaksana profesional sampai dengan tingkat manajer menengah tampaknya masih perlu diperhatikan. Bukan saja tenaga profesional yang handal dan menguasai ketrampilan pengelolaan perbankan yang paling mutakhir, namun tenaga profesional yang mempunyai

<sup>3</sup>Miranda Goeltom Siregar, "The effect of financial liberalization on firm's capital structure and investment: Evidence from a panel of Indonesia Manufacturing Establishments, 1981-1988", Boston University, unpublished dissertation, 1992.

kepribadian (*character*) dan dedikasi yang besar serta jujur, masih merupakan kelangkaan dan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh bank-bank saat ini.

Pengadaan tenaga profesional yang handal tidak dapat seluruhnya diserahkan kepada lembaga pendidikan perbankan yang ada, di sisi lain tidak kalah pentingnya perencanaan sumber daya manusia dalam usaha perbankan sendiri. Tanpa adanya program perencanaan SDM yang baik, maka tampaknya sukar bagi bank-bank untuk dapat berkembang baik karena efisiensi yang tinggi.

Bagaimana sosok bankir yang profesional? Kalau kita kembali kepada pengertian dasar dari profesionalisme, yakni "*Professionalism is mark of Qualities of Profession*", sementara arti *Profession* adalah "*Occupation especially one requiring advanced education and special training*", maka pengertian profesionalisme dapat kita ringkas sebagai **bekerja secara bermutu**. Menurut pengalaman saya, untuk mempersiapkan seseorang menjadi bankir profesional, ada lima kegiatan yang terpadu dan konsisten yang harus ditempuh, yakni : (i) Rekrutmen yang teratur, pendidikan dan pelatihan; (ii) Penempatan dan pengembangan karir dengan memberikan motivasi dan rotasi yang terarah, (iii) Penilaian kemampuan secara berkala yang didasarkan atas prestasi, potensi dan perilaku pegawai, dan (iv) Penggajian dan tunjangan sosial yang baik. Khususnya dalam hal Pendidikan dan Pelatihan, perlu tercakup didalamnya pendidikan yang meningkatkan *Human Skill, Technical Skill*, maupun *Conceptual Skill*.

### **Globalisasi dan Tehnologi Informasi Dalam Industri Perbankan**

Era globalisasi sering diidentikkan dengan era revolusi teknologi informasi. Bagi perbankan, kemampuan untuk tidak tertinggal dalam kemajuan yang dicapai di bidang teknologi informasi, merupakan salah satu ukuran mengenai daya saing perusahaan di dalam memobilisasi dana dan meningkatkan mutu pelayanannya. Kemampuan untuk ikut berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, akan meningkatkan daya saing perbankan serta meningkatkan kemampuan pengawasan, yang dapat mendeteksi dengan cepat kelainan yang terjadi di dalam pengambilan keputusan atau strategi usaha.

Hal ini akan penting artinya, mengingat bahwa kegiatan perdagangan maupun turisme memerlukan dukungan fasilitas perbankan yang memadai. Semakin besarnya kegiatan ekspor-impor baik dari segi volume perdagangan, jenis yang diperdagangkan, dan negara tujuan, mengharuskan perbankan melakukan perbaikan dalam mutu dan jenis pelayanan. Demikian pula dengan semakin meningkatnya pendapatan per kapita, seiring dengan pendalaman finansial dimana tingkat '*bank mindedness*' masyarakat semakin besar, maka fasilitas semacam ATM atau interkoneksi antar cabang merupakan prasyarat untuk dapat bersaing dengan baik di pasar. Saya melihat bahwa gagasan untuk menyewa transporder secara patungan antara berbagai bank yang berkepentingan demi untuk akses ke informasi internasional kemungkinan besar akan segera dapat diwujudkan.

### **Perbaikan Organisasi dan Struktur Modal**

Sejalan dengan usaha peningkatan efisiensi, perbaikan organisasi dan struktur modal perbankan, merupakan syarat mutlak yang mendukung tercapainya sasaran yang dikehendaki. Keinginan *jor-joran* untuk membuka cabang dengan segala fasilitas fisiknya yang 'wah' yang belum tentu mendukung fasilitas pelayanan tampaknya perlu dikekang. Organisasi yang ramping merupakan salah satu pilihan untuk meningkatkan produktivitas kerja dengan memotong berbagai jalur birokrasi yang tidak perlu. Tampaknya masalah desentralisasi dan proses pengambilan keputusan yang tidak bertele-tele untuk hal yang tidak perlu, merupakan langkah terbaik untuk mengantisipasi berbagai segmen pasar yang terus bergerak dengan dinamiknya masing-masing.

Perbaikan organisasi saja tidak akan banyak berguna apabila tanpa ditopang dengan struktur permodalan yang sehat. Ketatnya persaingan yang ada saat ini akan menyulitkan bank bermodal dasar kecil untuk dapat berkembang dan bersaing di pasar. Pertimbangan untuk melakukan merger merupakan salah satu alternatif yang perlu dipikirkan oleh sebagian bank-bank di Indonesia, walaupun pelaksanaannya tidak mudah dan memerlukan pertimbangan yang matang karena banyaknya berbagai kepentingan yang terlibat seperti misalnya kepemilikan dan masalah sumber daya manusia.

### **Kemampuan Memahami Ekonomi Makro - "a must"**

Persaingan yang ketat mengharuskan bank-bank untuk dapat membaca perkembangan ekonomi

dunia maupun ekonomi makro di dalam negeri, agarantisipasi yang diambil tidak membuat bank-bank terjerumus kedalam kebijakan pemberian kredit maupun mobilisasi dana yang *salah kaprah*. Pengamatan yang jeli akan membuahkan perencanaan dan strategi pengembangan perusahaan yang benar dalam jangka menengah dan jangka panjang. Kesadaran akan pentingnya kemampuan menjabarkan gerak-gerik makro ekonomi dan membaca indikator yang tersedia, tampaknya perlu ditingkatkan, bukan saja bagi manajer puncak, tetapi juga bagi manajer menengah atau pimpinan cabang yang pada tingkat tertentu merupakan pengambil keputusan terakhir. Banyak ahli berpendapat bahwa kredit mobil dan pembelian rumah yang menggebu-gebu pada tahun 1990 yang pada akhirnya menimbulkan masalah kredit macet, merupakan contoh betapa perbankan kurang mampu membaca lebih jauh ke depan impuls dan gerakan makro ekonomi baik secara nasional maupun internasional. Sehingga pengetahuan kredit yang dijalankan pemerintah demiantisipasi situasi makro yang cenderung memburuk langsung memukul kredit konsumtif semacam ini. Hal ini tidak perlu terjadi apabila pengamatan makro dan lingkungan dunia usaha dari perbankan cukup jeli dan hati-hati.

Untuk itu tampaknya kita perlu berhati-hati di dalam mengantisipasi Paket Kebijakan Perbankan 29 Mei 1993, yang tujuannya untuk menggalakan kembali sektor riil yang selama ini terhambat dalam ekspansi usahanya karena ketatnya perkreditan. Paket Mei 93 yang memberlakukan ketentuan cadangan minimal 0,2% dari aktiva lancar, 3% dari aktiva kurang lancar, 50% dari aktiva diragukan, dan 100% dari aktiva macet, memang telah mendorong kembali aktivitas



perkreditan yang selama hampir dua tahun sangat melemah. Penurunan suku bunga diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) oleh otoritas moneter, yang telah berdampak pada turunnya suku bunga pinjaman yang pada gilirannya menurunkan suku bunga kredit telah terlihat. Pertumbuhan kredit yang merosot tajam berbalik menjadi sangat tinggi. Alokasi kredit ke arah sektor industri, perdagangan dan jasa-jasa menunjukkan indikasi bahwa kegiatan di sektor-sektor tersebut meningkat. Namun seperti umumnya terjadi, sektor *real estate* selalu merupakan sektor yang pertama mengalami *boom* apabila perekonomian menjadi lebih baik. Hal ini jelas terlihat dari pemberian kredit konstruksi dan perumahan, yang sampai dengan Agustus 1993 telah meningkat lebih kurang 45% untuk tiga bulan terakhir sejak Pak Mei 93 dicanangkan. Pangsa kredit perumahan dan konstruksi juga telah meningkat dari sekitar 9% menjadi 13,5%, yang jauh melampaui pangsa kredit pertanian yang berkisar sekitar 7,5%. Perkembangan pesat juga terjadi pada kredit pemilikan rumah, yang terus meningkat hingga saat ini.

Adanya kecenderungan perubahan struktur demografi dan berhasilnya Perjanjian Putaran Uruguay, sub sektor tertentu tampaknya menjanjikan suatu prospek pertumbuhan yang lebih tinggi lagi di masa-masa mendatang. Sektor perumahan misal-

nya, dengan makin besarnya komposisi penduduk usia muda yang tingkat pendapatannya juga semakin besar, maka otomatis kebutuhan akan perumahan-seperti halnya alat rumah tangga-akan-semakin besar. Sub sektor makanan juga akan banyak dipengaruhi oleh membaiknya tingkat penghasilan rata-rata penduduk, sehingga kemungkinan bertumbuhnya industri makanan dan *fast-food* bukanlah hal yang mustahil.

Jelas dalam hal ini sektor perbankan bisa turut berperan serta, baik pemberian kredit investasi maupun dalam pemberian kredit modal kerja. Masalahnya adalah, bagaimana memahami secara baik gerak-gerik makro ekonomi yang akan sangat membantu masyarakat perbankan untuk dapat menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang sehat dan penuh dengan peluang. Masa kredit macet belum tertuntaskan, oleh sebab itu seluruh peluang bisnis yang tersedia hendaknya diantisipasi dengan ekspansi kredit yang ekstra hati-hati. Oleh sebab itu pemahaman makro ekonomi menjadi suatu keharusan-*a must*. Terpulang kepada dunia perbankan bagaimana kiat terbaik agar seluruh jajaran manajemen tingkat menengah atas mampu membaca berbagai peluang tantangan yang tersedia, serta menerjemahkannya dalam strategi dan operasi pengembangan perbankan yang efektif dan efisien.